

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 Amendemen, yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indoneisa, pada tanggal 10 Agustus 2002.

Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Republik Indonesia, Perubahan IV Undang Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 Perubahan.

Republik Indonesia, Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Amendemen.

Republik Indonesia, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, disahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1949 tentang Pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, pada tanggal 14 Desember 1949.

Republik Indonesia, Konstitusi RIS atau Undang-Undang Dasar RIS berlaku berdasarkan Keputusan Presiden RIS Nomor 48 tanggal 31 Januari 1950 tentang Mengumumkan Piagam Penandatanganan Konstitusi RIS, diumumkan di Jakarta pada tanggal 6 Pebruari 1950 oleh Menteri Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1950.

Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Sementara 1950, disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, pada tanggal 15 Agustus 1950.

Undang-Undang dari Negara Bagian Republik Indonesia Yogyakarta.

Republik Indonesia, Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001, tentang Kaidah Pelaksanaan.

Republik Indonesia, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Arah Kebijakan.

Republik Indonesia, Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000.

Republik Indonesia, Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste, yang ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2011.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5023).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

### **Buku**

Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Abu Daud Busroh, 2010, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Adnan Buyung Nasution, 2010, *Demokrasi Konstitusional: Pikiran & Gagasan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Afan Gaffar, 2004, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ahmad Redi, 2019, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ahmad Yani, 2013, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Responsif: Catatan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan*

*Peraturan Perundang-undangan*, Konstitusi Press, Jakarta.

Aidul F. Azhari, 2014, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Amiroeddin Sjarif, 1997, *Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Rineka Cipta, Jakarta.

Amirudin, & Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Anwar, 2011, *Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan)*, Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara, Intans Publishing, Malang.

Arbi Sanit, 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta.

Arthur Maass, 1959, *Area and Power: A Theory of Local Government*, The Free Press, Glencoe-Illinois.

Aziz Syamsuddin, 2011, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama.

Bachsan Mustafa, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2003, *DPR, DPD dan MPR dalam Undang-Undang Dasar 1945 Baru*, FH UII Press, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2000, *Teori Dan Politik Konstitusi*, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta.

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1987, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Armico, Bandung.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan. Hukum*

*Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Bayu Dwi Anggono, 2014, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

Budiono Kusumohamidjojo, 2016, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

CSIS, 1976, *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*, Yayasan Proklamasi, Jakarta.

Dahlan Thaib, 2000, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 1993, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta.

Darji Darmodiharjo, dkk, 1991, *Santiaji Pancasila, Usaha Nasional*, Surabaya.

David Held, 2004, *Demokrasi dan Tatanan Global: Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 1992, *From City-state to a Cosmopolitan Order?*, Political Studies.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Didik Sukriono, 2010, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Cetakan Pertama, Malang.

Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Alumni, Bandung.

Dimiyati Hartono, 2009, *Problematik & Solusi Amendemen Undang-Undang Dasar 1945*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Doto Mulyono, 1985, *Kekuasaan MPR Tidak Mutlak*, Erlangga, Jakarta.

Donald. A. Rumokoy, 2011, *Praktik Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia Kajian Perbandingan di Inggris, Amerika Serikat dan Belanda*, Media Prima Aksara, Jakarta.

Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Eddy Purnama, 2007, *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*, Nusa Media, Bandung.
- Edie Toet Hendratno, 2009, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Eka NAM Sihombing & Ali Marwan HSB, 2021, *Ilmu Perundang-Undangan*, Setara Press, Malang.
- Eman Hermawan, 2003, *Politik Membela Yang Benar Teori Kritik dan Nalar*, KLIK dan DKN Garda Bangsa, Yogyakarta.
- Gadjong, Agussalim Andi, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- H. L. A Hart, 2010, *Konsep Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- H. Subandi Al Marsudi, 2016, *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*, Rajawali Pers, Depok.
- Hans Kelsen, 2010, *General Theory of Law and State (Teori Umum tentang Hukum dan Negara)*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2010.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif; Prinsip-Prinsip Teoretis Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Hukum dan Politik*, Nusa Media, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office, Cambridge, Massachusetts, USA.
- Hans Nawiasky, 1948, *Allgemeine Rechtslehre als System lichen Grundbegriffe*, Benziger, Einsieden/ Zurich/Koln, Cet. 2.
- HRT Sri Soemantri, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Hufron, 2017, *Pemberhentian Presiden Di Indonesia Antara Teori dan Praktek*, LaksBang Pressindo Yogyakarta.
- J.C.T, Simorangkir, 1988, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, CV. Masagung, Jakarta.
- J.J.H. Bruggink, 1999, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- J.L. Austin, 1954, *The Province of Jurisprudence Determined and the Uses of the Study of Jurisprudence*, Weidenfeld and Nicolson, London.
- J. W. Harris, 1979, *Law and Legal Science: An Inquiry into the Concepts Legal Rule and Legal System*, Clarendon Press, Oxford.
- Jeremy Bentham, 1996, *An Introduction to the principle of Morals and Legislation*, ed. J.H. Burns and H.L.A. Hart, Clarendon Press, Oxford.
- Jimly Asshidiqie, 2013, "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif; Catatan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan", dalam kata pengantar, Ahmad Yani., Konstitusi Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Perihal Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII PRESS, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Teori Dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Ind.Hill-Co, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah*, UI Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI*, Jakarta, Cet I.
- Joeniarto, 1986, *Sejarah Ketanegaran Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Judith Shklar, 1996, *Montesqieu Penggagas Trias Politica*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

- Juliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kelik Wardiono, 2012, *SISTEM HUKUM CHINA: Sebuah Tatanan yang Terkonstruksi dalam Lintasan Li dan Fa*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2005, *Coastal Resources Management Project II, Menuju Harmonisasi Sistem Hukum sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Mitra Pesisir, Jakarta.
- King Faisal Sulaiman, 2017, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.
- Lab. Pancasila IKIP Malang, 1980, *Glossarium Sekitar Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Lexy J. Moleong, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung.
- Logeman, 1975, *Over de Theory van Een Steling Staatsrecht*, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkarejo, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Maass, Arthur, 1959, *Area and Power: A Theory of Local Government*, The Free Press, Glencoe-Illinois.
- Made Wiryani, 2021, *Ilmu Perundang-undangan, Jejak Pustaka*, Yogyakarta.
- Marjan Miharja, 2019, *Bahan Ajar Ilmu Perundang-Undangan: Gesetzgebungswissenschaft*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta.
- Maria Farida, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Kanisius, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, 1993, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Rajawali Press.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 1980, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT Gramedia, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, Raja Wali Pres, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Demokrasi dan Koste di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Montesquieu, 2007, *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, Nusamedia, Bandung.
- Muchtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Muchyar Yara, 1995, *Pengisian Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Suatu Tinjauan Sejarah Hukum Tata Negara*, PT. Nadhillah Ceria Indonesia, Jakarta.
- Mukhlis Taib, 2017, *Dinamika Perundang-Undang Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ni'matul Huda, 2014, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Depok.
- Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung.
- Padmo Wahjono, 1984, *Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter De Cruz, 2008, *Comparative Law in a Changing World*, Routledge, Cavendish.
- Philupus M Hadjon, 2005, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,



Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Prodjodikoro Wirjono, 1983, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakjat, Jakarta.
- PSHK, 2000, *Semua Harus terwakili: Studi Mengenai reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia*, Jakarta.
- Rachmat Trijono, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Papis Sinar Sinanti, Jakarta.
- Rahmat Salam, 2021, *Kembalilah Ke Pancasila*, Mahara Publishing, Kota Tangerang.
- Riduan Syahrani, 2004, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan III Edisi Revisi, Bandung.
- Ridwan H. R., 2022, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Riri Nazriyah, 2007, *MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rusadi Kantaprawira, 1977, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Tribisana Karya*, Bandung.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis edisi buku kedua*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satya Arinanto, 2012, *Silabus Perkuliahaan Politik Hukum Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia*, Jakarta.
- Soekarno, 2002, *Lahirnya Pantja-Sila*, Yayasan Kepada Bangsa-suku, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1963, *Dibawah Bendera Revolusi*, Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indo Hill-Co, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Soemantri M, 1985, *Ketetapan MPR (S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*, Remadja Karya, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1985, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subandi Al Marsudi, 2016, *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sukarno, 2006, *Demokrasi Politik Dengan Demokrasi Sosial*, dalam Kholid O. Santosa, *Mencari Demokrasi, Gagasan dan Pemikiran*, Segi Arsy, Bandung.
- Sulardi, 2009, *Reformasi Hukum: Rekontruksi Kedaulatan Rakyat Dalam Membangun Demokrasi*, In-Trans Publishing, Malang.
- Sunaryati Hartono, 1994 *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, PT. Alumni, Bandung.
- Suyatno, 2008 *Menjelajahi Demokrasi*, Humaniora, Bandung.
- Syaiful Bakhri, 2020, *Hukum Sanksi*, UM Jakarta Press, Jakarta.
- Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Tim Sekretariat Negara, 1998, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Tim Mahkamah Konstitusi RI, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-*

*Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku III, Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Tundjung Herning Sitabuana, 2020, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

Yudi Latif, 2016, *Negara Paripurna (Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaka Firma Aditya, Muhammad Adiguna Bimasakti, dan Anna Erliyana, 2023, *Hukum Administrasi Negara Kontemporer (Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia)*, Rajawali Pers, Depok.

### **Disertasi**

A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – IV*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta: 1990, hal. 287.

A. Hamid S. Attamimi, “*Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – IV*”, Disertasi, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Furcony Putri Syakura, “*Pengaturan Program Legislasi Nasional di Indonesia (Studi Pembentukan Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)*”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2020.

Hulman Panjaitan, “*Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Konsumen dan Menjamin Keseimbangan Kepentingan Konsumen dan Pelaku Usaha*”, Ringkasan Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2021.

Joko Widarto, “*Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (Kajian Pasal 7 Ayat (1) Butir b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)*”, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2016.

Megawati, *“Pengambilan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Perspektif Demokrasi Permusyawaratan Berbasis Pancasila”*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2020.

Radian Salman, *“Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Konstitusionalisme dan Demokrasi”*, Disertasi, Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2017

### **Jurnal/ Artikel/ Makalah**

Agus E Ekomadyo, *Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) Dalam Penelitian*, Journal Itenas No. 2 Volume 10, Agustus 2006.

Allan FGW & Harry S, *Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik.*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 4 Vol. 20 Oktober 2013.

Anna Maudina Manurung, et al., *“Sistem Hukum Nasional Indonesia Ditinjau Dari Pancasila dan UUD 1945”*, Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2 (1), 2024 : 118.

Anwar, *Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Intans Publishing, Malang: 2011.

Bagir Manan, *“Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Dalam Pembangunan Jangka Panjang IP”*, Makalah dalam Lokakarya Pancasila, Unpad, Bandung: 1994.

Bambang Sadono, *“Kontroversi Posisi Hukum Ketetapan MPR”*, Jurnal Majelis, Edisi 05/Tahun 2016.

Cosmas Batubara, *Mengenal Majelis Permusyawaratan Rakyat: Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Produk- Produknya*, Yayasan Aristokrasi, Jakarta: 1992.

Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta: 1993.

Efi Yulistiyowati, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani, *“Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amendemen”*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 18, No. 2, Desember 2016.

- Eman Hermawan, *Politik Membela Yang Benar Teori Kritik dan Nalar, KLIK dan DKN Garda Bangsa*, Yogyakarta: 2003.
- Fais Yonas Bo'a., "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi*, 15 (1). Pp 27-49, 2018.
- Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan Badan Pengkajian MPR RI, "Kajian Akademik: Memperkuat Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR Dalam Sistem Hukum Indonesia", Badan Pengkajian MPR, Jakarta: November 2018, Cetakan Pertama.
- Fartini, A., "Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Al-Ahkam*, 2018 14 (1), p. 1.
- Fuad, Fokky. 2013. "Filsafat Hukum Pancasila: Antara Cita Ideal Hukum dan Nilai Praksis". *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. Volume 13. Nomor 1. Oktober 2013.
- Hamid S. Attamimi, "Ketentuan Umum Perundang-undangan", Makalah dalam Seminar/Lokakarya yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Hendra Nurtjahjo, *Perwakilan Golongan di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, Jakarta: 2002.
- I Gde Pantja Astawa, "Makalah Identifikasi Masalah Atas Hasil Perubahan UUD 1945 Yang Dilakukan Oleh MPR Dan Komisi Konstitusi", Gedung Notariat FH Unpad, Bandung, tanggal 3 September 2004.
- I Gde Pantja Astawa, "Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945", Seminar Penguatan Lembaga Demokrasi DPD-RI Provinsi Jawa Barat yang diadakan oleh Universitas Pasundan bekerjasama dengan Sekretariat Anggota DPD Provinsi Jawa Barat, Bandung, tanggal 19 November 2005.
- Ismail Suny, *Implikasi Amendemen UUD 1945 Terhadap Sistem Hukum Nasional, disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, BPHN dan DEPKEH HAM RI, Bali: Juli 2003.
- Ismail Suny, *Kepastian Hukum Menuju Stabilitas Politik dan Ekonomi*, Pidato di hadapan Seminar PERSAHI (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia).
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: 2006.
- Jimly Asshiddiqie, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945", disampaikan dalam Seminar yang dilakukan oleh BPHN

dan DEPKEH dan HAM RI, Juli 2003.

Jimly Asshiddiqie, “*Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*”, Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional yang diadakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003.

Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, PSHTN UI, Jakarta: 2002.

Jimly Asshiddiqie, *Teori Dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Ind.Hill-Co, Jakarta: 1998.

Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah*, UI Press, Jakarta.

Machmud Aziz, “*Jenis, Tata Urutan (Susunan), dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*”, Makalah pada Seminar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta: 2004.

Mike McConville dan Wing Hong Chui, *Research Methods for Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh: 2007.

Mohal Hasan Wargakusuma, “*Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996/1997.

Mohammad Hatta, *Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat*, dalam Daulat Rakyat, No. 12, tanggal 10 Januari 1932.

Mohammad Hatta, “*Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat*”, dalam Daulat Rakyat, No. 12, tanggal 10 Januari 1932.

Monika Suhayati, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 2, No. 2, November 2011.

Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta.

Naning, Ramdlon, *Lembaga Legislatif Sebagai Pilar Demokrasi dan Mekanisme Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta: 1982.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Badan Pengkajian MPR RI, 2018.

Nisrina Irbah Sati, “*Ketetapan MPR dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49, No. 4,

2019.

Noor M Aziz, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan di Luar Hierarki Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta: 2010.

Nur Hidayat dan Desi Apriani., “*Koherensi Sistem Hukum Pancasila dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila*”, *Jurnal Negara Hukum*, 12 (1), 2021 : 152.

Penjelasan di depan PAH II MPR, mengenai Peninjauan Kembali Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI, 13 April 2003.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2010.

R. Guntur Prakoso Dewandaru, “*Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat*”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3, Tahun 2016.

Retno Saraswati, *Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Media Hukum/Vol.IX/No.2/April-Juni/2009*, No.ISSN 1411-3759, 2009.

Riswandha Himawan, “*Peningkatan Peran Legislatif DPR*”, Seminar Ketatanegaraan, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 5 Juli 1992.

Rosa Suhaeni, et al., “*Pancasila Sebagai Sistem Hukum*”, *Jurnal Gema Keadilan*, 9 (3), 2022 : 11-12.

Saly, *Hukum Adat Dan Arah Kebijakan Hukum Nasional*. Makalah Seminar Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2008.

Sekretariat Negara RI, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta: 1998.

Sidang Kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1945, bertempat di Gedung *Tyuuoo Sangi-In* (sekarang Kementerian Luar Negeri) yang diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, dengan agenda Persiapan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dasar dan Pembentukan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar.

Simamora, J. “*Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 (3), pp. 1-17, 2014.

- Sonyendah, “*Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Perspektif Pancasila.*” *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, 2015, 1(1). Pp 1-20.
- Sigit Riyanto, “*Re-Interpretasi Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional*” disampaikan Pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 26 Juni 2014.
- Sunarto, *Prinsip Check And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Kampus UNNES*, Semarang: 2016.
- Sri Wahyuni Tanszil, “*Urgensi Sidang Tahunan MPR-RP*”, Makalah Dipresentasikan Pada Workshop Ketatanegaraan Kerjasama MPR dan FH Unpad, Bandung: 2016.
- Suroto, *Harkat Dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol, II No. 3, September-Desember 2015.
- Tim IFES, *Sistem Pemilu*, IFES, UN, IDEA, Jakarta: 2001.
- Tim PSHK, *Semua Harus Terwakili Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta: 2000.
- Tim Sekretariat Negara, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta: 1995.
- Tri Suhendra Arbani, *Eksistensi Konvensi sebagai Sumber dan Praktek Ketatanegaraan di Indonesia*, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2016.
- Yusdiyanto, “*Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila dalam Sistem Demokrasi di Indonesia*”, Universitas Bandar Lampung, *Jurnal Fiat Justisia* Vol. 10, 2016.
- Yves Meny, Andrew Knap, *Government And Politics In Western EurOpe*, Oxford University Press, New York: 1998, Third Edition

### **Internet**

[https://mpr.go.id/berita/Ketua-MPR-RI-Bamsuet-Ingatkan-Indonesia-Butuh-Haluan-\(PPHN\)-dan-Bersiap-Hadapi-Ancaman-Krisis-Global-di-Depan-Mata](https://mpr.go.id/berita/Ketua-MPR-RI-Bamsuet-Ingatkan-Indonesia-Butuh-Haluan-(PPHN)-dan-Bersiap-Hadapi-Ancaman-Krisis-Global-di-Depan-Mata), diakses tanggal 29 Mei 2024.



<https://bisnis.tempo.co/read/619673/jembatan-selat-sunda-ancaman-bagi-indonesia>

<https://ekonomi.republika.co.id/berita/nek7ky/ini-alasan-pemerintah-batalkan-pembangunan-jembatan-selat-sunda>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/demokrasi>, diakses tanggal 30 Mei 2024.

<https://kemenag.go.id/opini/pancasila-sesuai-cita-cita-soekarno-hatta-jr2f6n>

<https://kemlu.go.id/thehague/id/pages/belanda/204/etc-menu>,

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/32807/8.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

<https://unimelb.libguides.com/c.php?g=930183&p=6722017#:~:text=The%20Thai%20legal%20system%20is,and%20Acts%2C%20decrees%20and%20custom.>

[https://web.parliament.go.th/view/7/The\\_26th\\_House\\_of\\_Representatives/EN-US](https://web.parliament.go.th/view/7/The_26th_House_of_Representatives/EN-US)

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20220721144106-574-824403/4-negara-asean-yang-berbentuk-kerajaan-malaysia-hingga-thailand/2>

[https://www.eerstekamer.nl/begrip/ambtelijke\\_organisatie](https://www.eerstekamer.nl/begrip/ambtelijke_organisatie)

<https://www.house.gov/leadership>

<https://www.house.gov/the-house-explained/officers-and-organizations>,

<https://www.houseofrepresentatives.nl/administration/organization-chart>

<https://www.mpr.go.id/berita/HNW-:-Pembukaan-Adalah-Bagian-Dari-UUD-Yang-Tidak-Bisa-Diubah>

[http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Organization/node\\_2846.htm](http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Organization/node_2846.htm)

[http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Organization/node\\_2847.htm](http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Organization/node_2847.htm)

<https://www.senate.gov/about/officers-staff.htm>

[https://www.senate.go.th/assets/portals/1/fileups/419/files/senate\\_chartDec22.pdf](https://www.senate.go.th/assets/portals/1/fileups/419/files/senate_chartDec22.pdf),

[https://www.staten-generaal.nl/begrip/the\\_states\\_general](https://www.staten-generaal.nl/begrip/the_states_general)

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Keaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Erokrasi*, dalam jimly.com

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* versi Online, di unduh dari

<https://kbbi.web.id/hukum>

Kiswondari, “*Fraksi MPR Usul Jadi Lembaga Tafsir UU*”, dalam <https://nasional.sindonews.com/berita/937444/149/fraksi-mpr-usul-jadi-lembaga-tafsir-uu>, diakses tanggal 29 Mei 2024.

Meirina Fajarwati, “*Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 48 No. 1 (2018), hal. 86, diterbitkan tanggal 19 Maret 2018, di unduh dari: <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1596>

mkri.go.id, “*Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia*”, lihat: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>

UNHCR, *Regional Operations Plan 2007 covering Indonesia, Brunei Darussalam, the Philippines, Singapore, and Timor-Leste*, dikases dari <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=44f8473a2&query=timor%20leste%20indonesia> <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=44f8473a2&query=timor%20leste%20indonesia>.

UNHCR, *Global Report 2003*, diakses dari: <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=40c6d74e0&query=timor%20leste%20indonesia>.

Valerie Augustine Budianto, “*Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior*” di unduh dari <https://www.hukumonline.com>